



Research Article

## **Politik Ekologis: Peran Istilah 'Ramah Lingkungan' dalam Melegitimasi Aktivitas Industri dan Pemerintah (Ecological Politics: The Role of the Term 'Environmentally Friendly' in Legitimizing Industrial and Government Activities)**

**Rifqi<sup>1</sup>, Abdillah Syaikhon<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia; [riefq816@gmail.com](mailto:riefq816@gmail.com)

<sup>2</sup>UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia; [syaikhongo@gmail.com](mailto:syaikhongo@gmail.com)

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License.

Received: ..... Revised : .....  
Accepted: ..... Available online : 23 Januari 2025

**How to Cite:** Rifqi, & Abdillah Syaikhon. (2025). *Ecological Politics: The Role of the Term 'Environmentally Friendly' in Legitimizing Industrial and Government Activities*. Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan, 1(1). Retrieved from <https://lenterademokrasi.hadana.id/index.php/i/article/view/2>

### **Abstrak**

*Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan istilah "ramah lingkungan" dalam konteks politik ekologis, menyoroti bagaimana istilah tersebut sering digunakan oleh industri dan pemerintah untuk melegitimasi praktik yang sebenarnya merusak lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, istilah-istilah seperti "go green" dan "bioteknologi" semakin populer, namun sering kali tidak mencerminkan realitas keberlanjutan. Fenomena "greenwashing" menjadi alat legitimasi bagi proyek-proyek yang mengklaim ramah lingkungan tetapi berdampak negatif pada ekosistem dan masyarakat lokal. Melalui studi*

*literatur, penelitian ini menganalisis berbagai kasus di Indonesia, termasuk konflik antara masyarakat lokal dan korporasi dalam pengelolaan sumber daya air serta kebijakan pemerintah yang tidak sinkron dalam menangani masalah lingkungan. Pendekatan ekologi politik digunakan untuk memahami hubungan antara kekuasaan, kebijakan, dan dampak lingkungan, serta untuk mempertanyakan sejauh mana istilah "ramah lingkungan" digunakan secara tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana "ramah lingkungan" sering kali lebih merupakan pembenaran sosial dan politik daripada representasi akurat dari realitas ekologis, sehingga menuntut perlunya skeptisisme kritis terhadap klaim keberlanjutan yang diajukan oleh berbagai aktor.*

**Kata Kunci:** *Politik Ekologi, Ramah Lingkungan, Greenwashing*

## **Pendahuluan**

Dalam beberapa dekade terakhir, diskusi tentang keberlanjutan lingkungan telah menjadi topik utama di berbagai sektor kehidupan, baik pada skala lokal maupun global. Istilah-istilah seperti "ramah lingkungan", "go green", dan "bioteknologi" semakin sering digunakan, baik oleh pemerintah, LSM, akademisi, maupun industri.

Penggunaan istilah ini bertujuan untuk mempromosikan perlindungan lingkungan dan pelestarian alam. Namun, di balik niat mulia tersebut, istilah "ramah lingkungan" tidak selalu mencerminkan kenyataan di lapangan. Istilah ini sering kali dimanfaatkan sebagai alat legitimasi bagi praktik-praktik yang sebenarnya tidak berkelanjutan, sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah "greenwashing".

Fenomena ini sangat relevan dalam konteks politik ekologis, di mana hubungan antara kekuasaan, kebijakan, dan lingkungan menjadi titik fokus. Politik ekologis tidak hanya menyoroti masalah lingkungan dari sudut pandang teknis, tetapi juga menekankan keterkaitannya dengan struktur ekonomi dan politik.

Banyak perusahaan dan institusi pemerintah menggunakan istilah "ramah lingkungan" sebagai cara untuk mengesahkan proyek-proyek yang, pada kenyataannya, merusak ekosistem atau meminggirkan komunitas lokal.

Beberapa studi telah menunjukkan dampak negatif dari penggunaan istilah ini dalam berbagai sektor. Misalnya, penelitian Yusuf & Purwandani (2020) tentang politik ekologis air di Yogyakarta menunjukkan bagaimana pembangunan industri pariwisata telah menyebabkan konflik antara warga lokal dan korporasi hotel terkait akses air bersih.

Meskipun pembangunan pariwisata sering kali dilabeli sebagai "berkelanjutan", hasil penelitian menunjukkan bahwa hotel-hotel di Yogyakarta melanggar beberapa regulasi terkait penggunaan sumber daya air yang berkelanjutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana istilah "ramah lingkungan" digunakan secara tepat dalam proyek-proyek industri.

Selain itu, diskusi tentang politik ekologis juga mendapat perhatian di ranah filsafat. Liu & Wang (2018) dalam artikel mereka tentang "Zhuangzi's Ecological Politics" menyoroti bagaimana pendekatan Tionghoa terhadap alam—khususnya dalam pemikiran Taoisme—dapat menawarkan perspektif baru tentang bagaimana manusia, alam, dan kekuasaan dapat hidup dalam harmoni. Pendekatan ini tidak hanya mempromosikan "keberlanjutan" secara dangkal, tetapi juga menyarankan cara hidup yang lebih menyatu dengan alam, tanpa eksploitasi yang berlebihan.

Dalam konteks yang lebih luas, Blühdorn (2019) menyoroti krisis legitimasi demokrasi dalam mewujudkan transformasi sosial-ekologis di negara-negara konsumen kapitalis. Ia berargumen bahwa meskipun demokrasi modern sangat tergantung pada legitimasi dari masyarakat, sering kali hal ini justru menjadi penghalang bagi terciptanya transformasi ekologi yang sesungguhnya.

Pemerintah sering kali menggunakan retorika "ramah lingkungan" untuk mempertahankan status quo tanpa benar-benar mengubah struktur ekonomi atau kebijakan yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Fenomena greenwashing, di mana perusahaan dan pemerintah menggunakan istilah "ramah lingkungan" sebagai alat untuk mengalihkan kritik dan memperbaiki citra mereka tanpa melakukan tindakan yang berarti, menjadi salah satu aspek penting dalam diskusi ini.

Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Ummah et al. (2023) tentang gerakan radikal di Indonesia pasca-reformasi menunjukkan bahwa masyarakat adat dan lokal terus berjuang melawan proyek-proyek pembangunan yang merusak lingkungan mereka. Meskipun pembangunan tersebut sering diklaim membawa manfaat ekonomi, masyarakat yang terdampak justru menolak proyek-proyek tersebut karena merusak keseimbangan alam dan mengancam kelangsungan hidup mereka.

Lebih lanjut, Zain et al. (2023) dalam studi mereka mengenai penanganan banjir rob di Pekalongan mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah lingkungan sering kali tidak sinkron dengan kebijakan pendukung lainnya. Alih-alih menekan dampak banjir, pemerintah malah melakukan pembangunan besar-besaran yang justru memperburuk masalah lingkungan. Studi ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dan sinkronisasi kebijakan dalam menangani isu-isu lingkungan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana istilah "ramah lingkungan" digunakan oleh aktor-aktor industri dan pemerintah untuk melegitimasi praktik-praktik yang sebenarnya merusak lingkungan. Melalui kajian politik ekologis, penelitian ini akan mengkritisi bagaimana istilah ini digunakan sebagai alat retorika yang justru sering menutupi kenyataan di lapangan, seperti dalam kasus proyek pembangunan yang mengklaim berkelanjutan tetapi mengakibatkan degradasi ekosistem dan ketidakadilan sosial.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur (library research), yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis berbagai sumber akademik, laporan kebijakan, dan literatur terkait yang relevan dengan isu politik ekologis dan penggunaan istilah "ramah lingkungan". Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memetakan wacana kritis tentang bagaimana istilah tersebut digunakan dalam praktik industri dan pemerintahan serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

### **Pendekatan ekologi politik**

Pendekatan ekologi politik merupakan cara yang komprehensif untuk memahami hubungan antara manusia dan lingkungan. Pendekatan ini pertama kali muncul pada tahun 1970-an dan mulai berkembang sebagai pemikiran baru di Indonesia pada akhir tahun 1980-an. Perspektif ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran neo-Marxian tentang keterbelakangan, yang secara tajam mengkritik pendekatan Malthusian dan ekologi budaya yang lebih tradisional.

Ekologi politik menyediakan lensa kritis untuk memeriksa hubungan antara masalah lingkungan dan struktur sosial-politik. Hal ini menekankan bahwa degradasi lingkungan bukan hanya masalah teknis atau ilmiah, tetapi terkait erat dengan dinamika kekuasaan, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketidakadilan sosial (Arifin et al., 2005).

Politik ekologis menggali cara-cara di mana masalah lingkungan dibingkai dan diperdebatkan dalam arena politik. Hal ini memeriksa bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk membangun narasi lingkungan, membentuk opini publik, dan mempengaruhi keputusan kebijakan (Arifin, 2012).

Ekologi politik menekankan bahwa masalah lingkungan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal dalam lingkungan itu sendiri, tetapi lebih dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti politik dan ekonomi. Hal ini mewakili pergeseran paradigma dari pandangan sebelumnya yang cenderung fokus pada faktor internal, seperti tekanan populasi (Malthusian) dan masalah teknis dalam pengelolaan sumber daya (ekologi budaya).

Pendekatan Malthusian berpendapat bahwa pertumbuhan populasi yang lebih cepat daripada produksi pangan akan menyebabkan persaingan di antara manusia untuk memperebutkan sumber daya, yang dapat mengakibatkan kelaparan. Menurut pandangan ini, kelaparan terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan pangan. Akibatnya, eksploitasi lingkungan meningkat untuk memenuhi kebutuhan pangan, seringkali mengabaikan keseimbangan ekologis dan pengelolaan yang etis.

Sebaliknya, ekologi politik mengkritik bahwa masalah lingkungan bukan hanya masalah internal, tetapi lebih didominasi oleh ketidaksetaraan dan tekanan kekuasaan. Ekologi politik mengarahkan pandangannya bahwa kerusakan lingkungan lebih sering disebabkan oleh faktor eksternal yang bersifat global dan struktural. Ini termasuk tekanan ekonomi global, kebijakan politik yang tidak adil, dan dominasi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Dengan demikian, kerusakan lingkungan tidak hanya dapat dilihat sebagai akibat dari faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi yang berlebihan atau teknik pengelolaan yang buruk. Sebaliknya, hal ini harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, termasuk bagaimana struktur politik dan ekonomi yang tidak adil dapat menciptakan kondisi yang merusak lingkungan.

Dalam konteks ini, penggunaan istilah "ramah lingkungan" seringkali menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk melegitimasi aktivitas mereka. Menurut pandangan Foucault tentang wacana, konsep "ramah lingkungan" yang sering kita temui sebenarnya hanyalah konstruksi sosial yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok berkuasa, khususnya industri dan birokrasi. Mencap aktivitas mereka sebagai "ramah lingkungan" seringkali tidak mencerminkan kenyataan, tetapi hanya memberikan legitimasi dan pembenaran bagi praktik mereka.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin mengklaim produknya ramah lingkungan karena menggunakan bahan daur ulang. Namun, jika proses produksinya masih menghasilkan limbah dan polusi yang signifikan, klaim tersebut dapat dianggap menyesatkan. Hal ini menunjukkan bagaimana wacana "ramah lingkungan" dapat digunakan untuk menciptakan citra positif tanpa mengatasi masalah lingkungan yang nyata.

Selain itu, ekologi politik juga mengkritik bagaimana kebijakan pemerintah seringkali lebih fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Contoh konkret adalah proyek infrastruktur besar yang sering diklaim ramah lingkungan tetapi dalam praktiknya merusak ekosistem lokal dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pendekatan ekologi politik menawarkan cara yang lebih kritis dan holistik untuk memahami hubungan antara manusia dan lingkungan. Dengan menekankan pengaruh faktor eksternal seperti politik dan ekonomi, pendekatan ini membantu mengungkap ketidakadilan struktural yang sering mendasari masalah lingkungan. Dalam konteks ini, wacana "ramah lingkungan" harus dilihat dengan skeptisisme kritis, memahami bahwa pelabelan semacam itu seringkali lebih tentang pembenaran sosial dan politik daripada kebenaran ekologis yang sebenarnya.

Pendekatan ekologi politik, yang menyoroti keterkaitan erat antara degradasi lingkungan dan dinamika kekuasaan, ketidaksetaraan ekonomi, serta ketidakadilan sosial, relevan dengan berbagai studi kasus yang mengeksplorasi konflik dan dampak lingkungan di Indonesia. Beberapa penelitian memperkuat konsep bahwa masalah lingkungan bukan hanya masalah teknis atau populasi, melainkan juga produk dari ketidakadilan struktural dan politik yang terjadi pada skala lokal hingga global.

Misalnya, dalam penelitian oleh Yusuf dan Purwandani (2020) mengenai politik ekologi air di Yogyakarta, ditemukan bahwa pengembangan pariwisata berdampak pada kehidupan penduduk setempat melalui eksploitasi sumber daya air oleh hotel-hotel besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah setempat mencoba menangani isu

ketersediaan air, kebijakan yang diterapkan tidak cukup kuat untuk menegakkan aturan terkait penggunaan air secara berkelanjutan.

Kasus ini mencerminkan bagaimana pendekatan ekologi politik dapat digunakan untuk memahami ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, di mana pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar (seperti korporasi hotel) mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan penduduk lokal yang tergantung pada air untuk kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini juga sejalan dengan pandangan ekologi politik bahwa konflik sumber daya, seperti air, seringkali didorong oleh kekuatan eksternal, seperti tekanan ekonomi global dan kebijakan politik yang tidak adil. Meskipun wacana yang sering muncul adalah "pengembangan ramah lingkungan," dalam kenyataannya, proyek-proyek pembangunan pariwisata sering mengabaikan keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa label "ramah lingkungan" dalam beberapa konteks lebih merupakan alat legitimasi daripada representasi akurat dari realitas ekologis.

Studi lain yang relevan adalah penelitian tentang politik ekologi banjir rob di Pekalongan oleh Herlina Muzanah Zain dan kawan-kawan (2023). Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menangani banjir rob terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, terutama dalam hal pembuangan limbah batik yang memperburuk kondisi banjir.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa masalah lingkungan seperti banjir rob tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial-politik dan ekonomi, serta bagaimana pemerintah sering gagal menyinkronkan kebijakan lingkungan dengan kebijakan lain yang mendukung. Situasi ini mencerminkan konsep ekologi politik di mana masalah lingkungan lebih dipengaruhi oleh kebijakan struktural yang tidak efektif dan lemahnya kekuatan politik untuk memaksakan perubahan nyata.

Selain itu, penelitian tentang radical grassroots movement dalam politik ekologi pasca-reformasi oleh Mustabsyrotul Ummah Mustofa dan rekan-rekan (2023) menggambarkan bagaimana masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat, melawan proyek-proyek pembangunan yang eksploitatif dan destruktif. Gerakan perlawanan masyarakat adat di Kinipan, Pulau Komodo, Wadas, dan tempat lainnya memperlihatkan bahwa pembangunan sering kali tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologis dan hak-hak masyarakat setempat.

Masyarakat adat menolak pertukaran material seperti kompensasi lahan karena mereka lebih peduli terhadap kelangsungan hidup mereka dengan alam. Ini menunjukkan bagaimana gerakan ekologi politik berkembang di tingkat akar rumput untuk menantang dominasi kekuatan ekonomi dan politik yang merusak lingkungan.

Kasus-kasus ini memperkuat pandangan bahwa degradasi lingkungan tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan, baik di tingkat lokal maupun global. Ketidakadilan

dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali diperburuk oleh kebijakan yang mendukung kepentingan kelompok-kelompok tertentu, sementara masyarakat lokal dan ekosistem yang mereka andalkan menjadi korban. Dalam konteks ini, pendekatan ekologi politik menyediakan lensa kritis untuk menganalisis masalah-masalah lingkungan yang kompleks dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

### **Politik Ekologis: Ramah Lingkungan sebagai Pembeneran**

Ramah lingkungan adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada berbagai aktivitas dan produksi yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam atau pada aspek perlakuan di mana semua tahap mulai dari proses manufaktur, pemanfaatan, limbah (sampahnya), dan pasca penggunaan (tidak terpakai) tidak mencemari dan merusak lingkungan, sehingga limbah yang dihasilkan harus dapat terurai kembali oleh lingkungan (alam). Konsep ramah lingkungan ini merupakan pengembangan dari konsep sebelumnya yaitu pembangunan berkelanjutan, sehingga semua pembangunan jangka panjang harus diarahkan menuju konsep ramah lingkungan.

Baru-baru ini, istilah ramah lingkungan semakin sering muncul dan ditemukan dalam berbagai produk dan aktivitas yang dilakukan oleh banyak orang. Produk-produk berlabel ramah lingkungan (produk hijau) dapat ditemukan mulai dari lemari es, pendingin ruangan (AC), ponsel, fesyen, peralatan rumah tangga, kosmetik, minuman, cat, bahkan bahan bakar (BBM), pelumas, dan kendaraan bermotor.

Demikian pula, berbagai aktivitas memberi label aktivitas mereka dengan berbagai istilah ramah lingkungan, sehingga istilah-istilah seperti go green, kembali ke alam, produk hijau, bisnis hijau, pelestarian lingkungan, perumahan hijau, hutan untuk kita semua, satu pohon satu kehidupan, mendominasi papan reklame, spanduk, dan wacana yang berkembang.

Pertanyaan mendasar dan kritis yang mungkin perlu kita tanyakan adalah seberapa ramah lingkungan produk dan aktivitas ini sebenarnya, apakah bahan yang digunakan tidak berasal dari serat plastik (serat sintetis) yang sulit terurai, apakah bahan yang digunakan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya (zat adiktif).

Melalui perspektif ekologi politik, pertanyaan-pertanyaan di atas tidaklah tidak berdasar karena sebagai sebuah wacana, penggunaan istilah ramah lingkungan tidak selalu memiliki makna yang sebenarnya, tetapi sangat mungkin bahwa itu hanyalah sebuah pembeneran atas apa yang dilakukan.

Oleh karena itu, tidaklah tidak berdasar jika sebuah produk yang menekankan dominasi warna lingkungan seperti hijau dan biru kemudian memberi label produknya sebagai produk hijau. Produk dan aktivitas yang diberi label dengan berbagai istilah ramah lingkungan di atas tidaklah salah, jika secara konsisten, produk dan aktivitas tersebut memang bertujuan untuk mengatasi masalah lingkungan yang ada. Tetapi kadang-kadang, produk dan aktivitas yang diberi label ramah lingkungan lebih ditujukan untuk meningkatkan popularitas atau meningkatkan penjualan produk di mata publik.

Pembenaran untuk aktivitas dengan label ramah lingkungan juga sering terlihat dalam konsep-konsep yang disebarluaskan oleh berbagai kelompok kepentingan. Ketika sekelompok anak sekolah dasar diminta untuk membuang botol minuman ke tempat sampah yang disediakan, para guru dengan bangga memberi labelnya sebagai aktivitas ramah lingkungan (sekolah dasar).

Demikian pula, ketika pemerintah melakukan reboisasi yang diberi label dengan istilah *go green*, *one tree one life*, *forest for all of us*, dan sebagainya. Menanam satu juta pohon memang "diharapkan" dapat mengatasi masalah pemanasan global yang banyak dikhawatirkan oleh banyak orang, tetapi apakah cukup hanya menanam tanpa perawatan, menanam tanpa pengawasan, menanam tetapi kemudian ditebang kembali. Semua terlihat indah tetapi sebenarnya hanyalah wacana para pemegang kekuasaan untuk memberi label diri mereka sebagai pelestari lingkungan.

Sebagai sebuah wacana, istilah ramah lingkungan tentu harus dipopulerkan di kalangan masyarakat, sehingga wacana tersebut berkembang sebagai isu yang dianggap penting. Dengan kata lain, keberhasilan para pemegang kekuasaan dalam memberi label diri mereka sebagai ramah lingkungan ditunjukkan melalui keberhasilan wacana tersebut diakses oleh komunitas mereka.

Oleh karena itu, mereka yang kuat (berkuasa dan mampu mengendalikan wacana) akan dianggap lebih benar dalam pelabelan mereka. Sehingga cara-cara petani melakukan aktivitas pertanian mereka yang tidak menggunakan zat adiktif terkadang harus dikalahkan oleh konsep-konsep ilmuwan tentang metode pertanian yang lebih efektif dan efisien tetapi harus menggunakan zat adiktif.

Munculnya pelabelan aktivitas melalui wacana ini terkadang tidak selalu berdiri sendiri. Faktor-faktor kekuasaan yang lebih besar terkadang juga mempengaruhi, yang dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem kapitalis. Hal ini terlihat misalnya pada bagaimana kapitalisme di negara-negara Barat yang selalu mempertanyakan perlunya negara-negara berkembang untuk selalu ramah lingkungan, sementara mereka sendiri selalu lapar untuk mengkonsumsi dan memproduksi teknologi yang merusak lingkungan (bahan kimia, predator, dll).

Oleh karena itu, wacana ini sering dikabarkan sebagai salah satu cara bagi negara-negara Barat untuk mendominasi pasar negara-negara berkembang, menciptakan citra seolah-olah mereka ingin menghapus kemiskinan (kasus Indonesia, Burma), atau menggulingkan pemerintah otoriter (kasus Irak dan Iran).

Dalam politik ekologi, terdapat hubungan antara kekuasaan dan pelabelan aktivitas yang dianggap ramah lingkungan, yang sering kali hanya digunakan untuk meningkatkan citra tanpa perubahan nyata. Blühdorn (2019) dalam analisisnya mengenai krisis legitimasi demokrasi mengemukakan bahwa demokrasi saat ini sering menjadi alat bagi negara-negara kapitalis untuk melanggengkan ketidaksinambungan ekologi, meskipun di permukaan mereka menyuarakan perlindungan lingkungan. Konsep "greenwashing" atau pencitraan ramah lingkungan tanpa aksi nyata juga muncul dalam politik ekologi di

Indonesia, terutama dalam isu-isu seperti reboisasi yang sering digembar-gemborkan namun tanpa pengelolaan yang tepat.

### **Politik Ekologis dan Keadilan Sosial**

Kehadiran wacana ramah lingkungan dalam masyarakat seringkali menghasilkan aktivitas yang bertujuan mengatasi berbagai masalah lingkungan yang kurang memiliki substansi yang sebenarnya, karena penampilan (citra) terkadang lebih diutamakan daripada substansi itu sendiri. Oleh karena itu, wacana menjadi ramah lingkungan harus diinterpretasikan secara bijaksana apakah benar-benar bertujuan untuk mensosialisasikan konsep itu sendiri atau hanya berfungsi sebagai "perisai" bagi kepentingan tertentu.

Masalah timbul ketika sebuah wacana diterima oleh masyarakat atau kelompok sosial tertentu sebagai kebenaran (sedangkan dalam kenyataannya, itu hanyalah membenaran). Pembenaran sebuah wacana dapat menyebabkan masyarakat atau kelompok sosial terjebak dalam anggapan bahwa apa yang telah dilakukan oleh seseorang (atau sekelompok orang) memang menyelamatkan atau melestarikan lingkungan.

Jika hal ini terjadi, masyarakat atau kelompok sosial yang berinteraksi langsung dengan masalah lingkungan akan merasa tertindas oleh mereka yang mendapatkan keuntungan dari wacana tersebut. Dengan kata lain, wacana sebagai media pembenaran untuk aktivitas akan mengandung unsur ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial antar kelompok dalam masyarakat.

Menurut para ahli ekologi politik, masalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial inilah yang sebenarnya mendasari munculnya berbagai masalah lingkungan di banyak wilayah ekologis. Oleh karena itu, para ahli ekologi politik memandang bahwa masalah lingkungan bukan disebabkan oleh masalah dalam lingkungan itu sendiri, melainkan oleh masalah dominasi antar kelompok (kekuasaan dan otoritas).

Dominasi semacam itu membuat masyarakat yang berinteraksi langsung dengan lingkungan tidak dapat lepas dari ketidakberdayaan, sehingga tidak memiliki alternatif lain selain mengeksploitasi lingkungan dalam kehidupan mereka. Ekologi politik juga memandang bahwa ketidakadilan dan ketidaksetaraan ini menyebabkan munculnya masalah-masalah lain (multi-dampak) dalam kehidupan manusia, yang bersifat timbal balik. Dengan kata lain, kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan dan pengendalian sumber daya yang tidak setara akan menyebabkan tekanan yang meningkat terhadap lingkungan, sehingga memperparah degradasi lingkungan.

Hal ini dapat dilihat misalnya dalam munculnya berbagai penyakit baru yang sulit dipahami dan sebelumnya tidak terdeteksi oleh para ahli kesehatan. Bagi para ahli ekologi politik, munculnya penyakit-penyakit baru ini disebabkan oleh kapasitas lingkungan yang rendah untuk menyerap berbagai energi negatif. Kapasitas lingkungan yang rendah ini sebagian disebabkan oleh meningkatnya jumlah limbah produk yang tidak dapat terurai.

Peningkatan limbah produk yang tidak dapat terurai tidak berarti kurangnya kesadaran manusia untuk menggunakan produk ramah lingkungan. Hal ini lebih disebabkan oleh tekanan yang tinggi pada kesadaran manusia (sistem kognitif) bahwa produk modern lebih higienis, lebih sehat, berkualitas lebih tinggi, dan sebagainya. Kesadaran ini terbentuk melalui penguatan wacana yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu, membuat produk yang menekankan bahan-bahan murni lingkungan dipopulerkan sebagai inferior, tidak layak dikonsumsi, tidak sehat, dan sebagainya.

Contoh kasus di atas menunjukkan bagaimana sebuah wacana yang dianggap sebagai kebenaran pada akhirnya menciptakan dampak negatif ganda pada "konsumen" wacana tersebut. Sebaliknya, para pencipta wacana mengalami dampak ganda yang positif karena penguatan wacana tersebut semakin membuka peluang bagi mereka untuk menghasilkan aktivitas dan produk selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa dampak ganda yang dihasilkan oleh wacana ramah lingkungan sebenarnya menghasilkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Sebagai contoh, dalam studi Yusuf dan Purwandani (2020) mengenai politik ekologi air di Yogyakarta, terlihat bahwa pembangunan industri pariwisata, terutama hotel-hotel besar, telah menyebabkan krisis air bagi penduduk lokal. Konflik antara masyarakat dan korporasi hotel menggambarkan bahwa pemerintah sering kali tidak cukup kuat untuk menegakkan regulasi terkait penggunaan air secara adil.

Hotel-hotel yang melanggar regulasi air tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menghilangkan hak masyarakat lokal atas sumber daya alam yang sangat mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Kasus ini menggambarkan dengan jelas bagaimana ketidakadilan ekologis menciptakan ketidaksetaraan sosial, di mana kelompok yang lebih lemah harus menanggung dampak negatif dari tindakan kelompok yang lebih kuat secara ekonomi dan politik.

Hal yang serupa dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Ummah Mustofa et al. (2023) tentang gerakan radikal akar rumput dalam politik ekologi Indonesia pasca-reformasi. Masyarakat adat yang terdampak oleh proyek-proyek pembangunan yang eksploitatif dan destruktif, seperti yang terjadi di Kinipan dan Wadas, menunjukkan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar perlawanan terhadap pengambilalihan lahan, tetapi juga sebuah bentuk protes terhadap ketidakadilan ekologis.

Kearifan lokal dan pengetahuan turun-temurun tentang keseimbangan alam menjadi landasan utama dalam gerakan ini, yang menolak pertukaran material semata demi kelangsungan hidup dengan alam. Gerakan perlawanan ini memperlihatkan bagaimana dominasi kelompok ekonomi kuat sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal yang hidup bergantung pada alam, sehingga menciptakan ketidaksetaraan yang semakin tajam.

Lebih jauh lagi, konsep politik ekologi dalam perspektif Taoisme, seperti yang diusulkan oleh Liu Yongmou dan Wang Hao (2018), menawarkan alternatif yang menarik dalam memahami hubungan antara manusia, alam, dan kekuasaan. Mereka mengusulkan bahwa pendekatan politik ekologi seharusnya tidak sekadar mengatur penggunaan sumber daya

alam, tetapi juga melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan manusia dengan alam. Dengan "bermain dengan alam" secara bebas dan tulus, manusia bisa mengurangi ketegangan yang timbul dari dominasi kekuasaan dan ideologi. Pendekatan ini menawarkan cara untuk mendekonstruksi struktur otoritas yang kaku dan membuka ruang bagi interaksi yang lebih harmonis antara manusia dan alam.

Namun, tantangan terbesar dalam mencapai keadilan ekologi adalah adanya krisis legitimasi demokrasi, seperti yang dijelaskan oleh Blühdorn (2019). Demokrasi, yang pada awalnya dianggap sebagai sarana untuk mencapai transformasi sosial-ekologis, kini justru menjadi penghalang utama. Struktur negara modern yang bergantung pada legitimasi politik telah menciptakan sebuah "plafon kaca" yang menghalangi transformasi menuju masyarakat yang lebih ramah lingkungan. Dengan kata lain, sistem demokrasi kapitalis yang berorientasi pada konsumsi berkelanjutan tidak mampu mewujudkan perubahan ekologis yang diperlukan, karena terjebak dalam paradoks legitimasi politik yang menjadikan politik ekologis sebagai alat politik ketidakberlanjutan.

Contoh lain datang dari penelitian tentang pengelolaan hutan adat di Kabupaten Katingan, yang dilakukan oleh Jariah et al. (2023). Hutan adat di Kalimantan Tengah berfungsi sebagai penopang ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Namun, implementasi kebijakan pengelolaan hutan adat sering kali kurang maksimal karena lemahnya penegakan hukum dan kebijakan yang belum optimal. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang ada tidak dieksploitasi secara tidak adil oleh pihak-pihak yang lebih kuat secara ekonomi.

Dalam konteks penanganan banjir rob di Pekalongan, studi yang dilakukan oleh Zain et al. (2023) menunjukkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan banjir rob sebagian besar disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum terkait limbah batik yang mencemari lingkungan. Ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan pendukung lainnya juga menjadi faktor penghambat dalam menyelesaikan masalah ini. Kasus ini menunjukkan bagaimana politik ekologis dapat terhambat oleh kurangnya sinergi antara berbagai pihak yang seharusnya bekerja sama untuk mengatasi masalah lingkungan.

## Kesimpulan

Dalam wacana politik ekologis, istilah "ramah lingkungan" seringkali digunakan sebagai alat legitimasi bagi berbagai aktivitas industri dan kebijakan pemerintah. Istilah ini, yang seharusnya mencerminkan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan, justru sering dimanfaatkan untuk membenarkan eksploitasi sumber daya alam yang menguntungkan pihak tertentu, sementara masyarakat lokal yang terdampak menderita ketidakadilan sosial dan ekologis.

Penelitian-penelitian yang relevan menunjukkan bahwa ketidakadilan ekologis muncul akibat dominasi kekuasaan dan otoritas dalam pengelolaan sumber daya. Dalam banyak

kasus, seperti di Yogyakarta dan kawasan lain, pembangunan industri pariwisata dan proyek-proyek pembangunan seringkali melanggar prinsip-prinsip keberlanjutan, terutama dalam penggunaan sumber daya air dan hutan. Akibatnya, terjadi konflik antara masyarakat lokal dengan para pemangku kepentingan yang lebih kuat secara ekonomi dan politik

Pendekatan politik ekologis menyoroti bahwa isu-isu lingkungan tidak hanya berkaitan dengan degradasi fisik alam, tetapi juga dengan ketidaksetaraan sosial. Wacana ramah lingkungan sering kali digunakan untuk memperkuat posisi elite dan mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hal ini telah mendorong munculnya gerakan perlawanan radikal di berbagai wilayah, yang menuntut keadilan ekologis dan sosial melalui pelestarian lingkungan berdasarkan kearifan lokal.

Dengan demikian, istilah "ramah lingkungan" harus dipertanyakan dan dilihat secara kritis, terutama ketika digunakan sebagai justifikasi untuk aktivitas yang sebenarnya merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat yang terdampak.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Z., Pujiraharjo, S., & Rahman, F. (2005). *Antropologi Ekologi: Suatu Pengantar*. Laboratorium Antropologi FISIP Universitas Andalas, Padang.
- Arifin, Z., (2012). Politik ekologi: Ramah lingkungan sebagai pembenaran. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(1), 1-16.
- Bahri, S., Kusmanto, H., Broven, F., & Ardian, M. (2021). Politik kebijakan: Sebuah studi pada implementasi kebijakan politik ekologi terhadap perlindungan dan pelestarian hutan di Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Transformative*, 7(2), 123-137. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.02.5>
- Baugh, G. (1980). *The Politics of Social Ecology*. In M. Bookchin (Ed.), *Renewing the Earth, The Promise of Social Ecology*. Black Rose Books.
- Bennett, J. W. (1976). *The Ecological Transition: Cultural Anthropology and Human Adaptation*. Pergamon Press.
- Blühdorn, I. (2019). The legitimation crisis of democracy: Emancipatory politics, the environmental state and the glass ceiling to socio-ecological transformation. *Environmental Politics*, 29(1), 38-57. <https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1681867>
- Dauvergne, P. (2018). *Environmentalism of the Rich*. MIT Press.
- Guha, R. (1989). Radical American Environmentalism and Wilderness Preservation: A Third World Critique. *Environmental Ethics*, 11(1), 71-83.

- Haluza-DeLay, R. (2008). *Rethinking Environmental Justice in Sustainable Cities*. UBC Press.
- Jariah, A., Ariyadi, & Riyanti, N. (2023). Pengelolaan hutan adat pada perspektif ekologi politik dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Katingan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 75-90.
- Kopnina, H., & Shoreman-Ouimet, E. (Eds.). (2007). *Environmental Anthropology Today*. Routledge.
- Liu, Y., & Wang, H. (2018). Zhuangzi's ecological politics: An integration of humanity, nature, and power. *Environmental Ethics*, 40(1), 21-39. <https://doi.org/10.5840/enviroethics20184014>
- Martinez-Alier, J. (2002). *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation*. Edward Elgar Publishing.
- Mustofa, M. U., Sulaeman, K., Nurdini, F. M., & Raudya, M. D. K. (2020). Radical grassroots movements dalam politik ekologi di Indonesia pasca reformasi. *Indonesian Journal of Political Participation*, 4(1), 23-39. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v4i1.6623>
- Muzanah Zain, H., Aidar Idrus, I., Pangestu, A. R., & Ramadhan, M. (2023). Politik ekologi: Kebijakan penanganan banjir rob di Pekalongan. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 9(1), 45-58.
- Orlove, B. S. (1980). Ecological Anthropology. *Annual Review of Anthropology*, 9, 235-273.
- Pickett, S.T.A., M.L. Cadenasso (2002). Ecosystem As A Multidimensional Concept, Meaning, Model And Metaphor. *Ecosystems*. 5:1-10.
- Ricoeur, P. (2002). *Filsafat Wacana: Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa*. IRCISoD.
- Swyngedouw, E. and N. C. Heynen (2003). Urban Political Ecology, Justice and the Politics of Scale. *Antipode* 35(5): 898-918.
- Yusuf, M., & Purwandani, I. (2020). Ecological politics of water: The ramifications of tourism development in Yogyakarta. *South East Asia Research*, 28(3), 327-343. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2020.1821580>.